KLIPING PERPUSTAKAAN DPR-RI
http://kliping.dpr.go.id

**Judul** : Perbaiki kualitas,DPR rencana bangun sekolah parlemen
**Tanggal** : Sabtu, 27 Agustus 2016
**Surat Kabar** : Seputar Indonesia
**Halaman** : 14

# Perbaiki Kualitas, DPR Rencana Bangun Sekolah Parlemen

**JAKARTA** - Di tengah kondisi DPR yang mulai kehilangan kepercayaan publik dan bercitra buruk di berbagai media massa dan media sosial, pimpinan DPR berencana membangun Sekolah Parlemen. Tujuannya untuk memperbaiki kualitas anggota Dewan mulai dari DPR, DPRD provinsi, hingga DPRD kabupaten/kota.

"Dalam rapim (rapat pimpinan) membahas agenda yang akan dibahas di Bamus (Badan Musyawarah) mendatang. Kita juga bahas soal persiapan membuat Sekolah Parlemen untuk meningkatkan kualitas anggota DPR pada masa yang akan datang dan DPRD tingkat 1 dan 2 se-Indonesia," ungkap Ketua DPR Ade Komarudin kepada wartawan di Gedung DPR, Jakarta, kemarin.

Ade mengatakan, pembangunan Sekolah Parlemen ini untuk meningkatkan kualitas anggota DPR dan DPRD masa mendatang dan masa kini agar menjadi lebih baik lagi di masyarakat. Namun, bentuk sekolahnya itu sedang dikaji oleh DPR dan akan diumumkan peluncuran resminya nanti. "Tujuan kita, peningkatan kualitas para legislator, anggota Dewan yang selama ini diharapkan masyarakat berkualitas. Baik fungsi sebagai pembuat undang-undang, penyusun APBN, maupun fungsi pengawasannya," paparnya.

Menurut Ade, sekolah ini diperlukan mengingat banyak keluhan masyarakat terhadap kualitas Dewan baik itu DPR maupun DPRD. Saat ini anggota DPR kalangan artislah yang menjadi kambing hitam atas buruknya kerja DPR. Padahal, pada Pemilu 2009 publik ramai-ramai memilih artis sebagai anggota Dewan.

Ade menjamin rencana ini tidak akan tumpang tindih dengan fungsi parpol. Parpol juga pastinya akan menekankan kualitas kadernya yang akan dipilih sebagai caleg. Yang terpenting, pola rekrutmennya dilakukan dengan sistem yang baik. "Tentu mereka tahu dulu apa itu fungsi legislasi, bagaimana cara mengerjakan, membahas UU, merancang UU, fungsi pengawasan juga sama, fungsi anggaran. Itu bukan hal mudah, tapi itu juga tergantung pola rekrutmen," ungkapnya.

Menurut Ade, target pembangunan sekolah ini tidak akan lama lagi atau diharapkan tahun ini. Tempatnya akan menggunakan Wisma DPR di Kopo, Puncak, Bogor, Jawa Barat yang akan diubah menjadi sekolah. Untuk anggaran, DPR akan mengupayakan penggunaan anggaran seminimal mungkin dengan mengubah anggaran yang sudah ada. "Sekarang juga sudah oke sebagai wisma kita alih fungsikan. Kemudian untuk persiapan para dosennya tidak banyak. Dengan biaya yang sangat minim, kita ingin tingkatkan kualitas anggota," ungkapnya.


KOPAN SINDO/ULUM T.O

**ADE KOMARUDIN**
Ketua DPR

Selain itu, DPR juga akan membangun museum dan perpustakaan. Untuk sementara, gedung yang digunakan adalah Gedung Nusantara atau yang dikenal dengan Gedung Kura-Kura. Tujuannya agar masyarakat yang ingin tahu sejarah parlemen Indonesia bisa langsung mengunjungi. "Antusiasmenya luar biasa, kita harus fasilitasi agar kita miliki arsip yang baik. Sejarah parlemen juga supaya diketahui anak-anak sekolah," tandasnya.

Wakil Ketua Badan Urusan Rumah Tangga (BURT) DPR Novita Wijayanti mengatakan, program pembangunan Sekolah Parlemen belum ada dalam program BURT. Dia juga mengaku belum pernah membahas itu. "Setahu saya belum (dibahas), mungkin baru wacana," kata politikus Partai Gerindra itu.

Research Manager Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi) Lucius Karus berpendapat, gagasan membangun Sekolah Parlemen memang menarik dan positif di tengah kondisi parlemen yang mendapatkan komentar dan penilaian buruk dari publik. Namun, baiknya rencana itu tidak semata-mata respons instan lantaran buruknya komentar publik. "Ini kebijakan yang berdampak pada keuangan negara, perlu kajian yang lebih mendalam sebelum itu direalisasikan," kata Lucius.

Menurut Lucius, untuk DPR yang saat ini menjabat, Sekolah Parlemen dinilai sudah tidak efektif lagi. Sisa periodenya sudah tinggal sebentar lagi. DPR saat ini juga sudah tidak memiliki waktu karena harus menjalankan tugasnya yang masih menumpuk khususnya bidang legislasi. Jangan sampai mereka alih-alih ingin sekolah lantas meninggalkan tugasnya di DPR.

Selain itu, dengan membangun sekolah parlemen, ketua DPR juga seolah menganggap bahwa anggota DPR saat ini tidak bermutu dan tidak berkualitas. Padahal, banyak sekali anggota DPR yang merupakan lulusan S-2, bahkan profesor. Formappi juga mengkritisi tata perencanaan DPR yang seringkali bombastis, tidak realistis, dan tidak terfokus. "Tugas mendidik anggota DPR adalah tugas utama parpol saat seleksi kader dulu sehingga ketika di parlemen kualitasnya baik," ucapnya.

**kiswondari**